



Pengaruh Implementasi Kebijakan Statistik terhadap Manajemen Survei dalam Mewujudkan Efektivitas Kinerja Pegawai Lapangan Badan Pusat Statistik

Dani Hapidin Rojab

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh implementasi kebijakan statistik terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Metoda analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis kausal efektif dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara variable Implementasi kebijakan statistik terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan. Lokasi penelitian adalah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable intervening dan variabel dependen. Implementasi kebijakan statistik berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, implementasi kebijakan statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen survei, implementasi kebijakan statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan dan manajemen survei berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik kabupaten Garut. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan dan manajemen survei secara baik dapat dilakukan dengan meningkatkan Implementasi kebijakan statistik.

Kata kunci: efektivitas kinerja pegawai, implementasi kebijakan statistik, manajemen survei

1 Pendahuluan

Salah satu isu strategis dalam bidang pemerintahan adalah menguatnya tuntutan publik terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih karena hal itu merupakan salah satu pondasi awal aktualisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan fungsinya untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Berangkat dari peran dan fungsinya tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan yang menuntut kesiapan dari seluruh aparatur pemerintah daerah untuk bergerak secara sinergis dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan pencapaian pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat secara optimal.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut sebagai salah satu lembaga publik daerah memiliki peranan yang krusial dalam melayani kebutuhan publik berupa data-data perkembangan dinamika kehidupan masyarakat secara menyeluruh seperti berhubungan dengan demografi dan kependudukan, sosial, ekonomi, pertanian dan sebagainya haruslah mampu menjawab dengan ragam aktivitas institusional berlandaskan *transparansi* dan *akuntabilitas* serta memenuhi prinsip-prinsip pelayanan prima. Terkait dengan fungsi pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik maka kebijakan, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, daya dukung infrastruktur, pelayanan publik harus bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya agar publik mendapat pelayanan secara maksimal, salah satunya adalah Kebijakan Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Bab II pasal (3) bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk:

- a. Mendukung pembangunan nasional;
- b. Mengembangkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan
- d. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan statistik adalah asas-asas pembangunan nasional yang meliputi asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejujuran, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya.

Pelaksanaan kebijakan statistik diduga belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan lemahnya manajemen survei dan berimbas pada efektivitas kinerja petugas lapangan, padahal kebijakan statistik ini merupakan regulasi yang dapat dijadikan pijakan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan Badan Pusat Statistik yang berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa yang diwujudkan dalam keseimbangan tujuan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan lembaga secara internal melalui pelayanan data yang akurat dengan harapan agar tujuan statistik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Bab II pasal (4), kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Terkait dengan permasalahan statistik Kabupaten Garut tidak luput dari berbagai macam kendala yang dihadapi seperti rendahnya kualitas data yang dihasilkan oleh aktivitas BPS sebagai akibat rendahnya kesadaran responden baik perorangan maupun lembaga dalam memberikan informasi yang dibutuhkan secara benar sehingga berimplikasi terhadap akurasi data belum optimal. Rendahnya animo publik untuk menjadi responden merefresentasikan sosialisasi kebijakan statistik yang belum disusun secara baik. Sebagai gambaran dibawah ini disajikan penilaian pencapaian strategis kinerja organisasi, beberapa indikator ditetapkan untuk setiap tujuan dalam proses kebijakan statistik selama Tahun 2015 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Target, dan Pencapaian Tahun 2015 BPS Kabupaten Garut

No	Tujuan		Target 2015	Pencapaian 2015
	Uraian	Indikator		
1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	70%	60%
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase konsumen terhadap pelayanan data BPS	84%	75%
3	Peningkatan birokrasi yang handal	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat	75	60

Sumber: BPS Kabupaten Garut 2015

Tabel 1 menunjukkan rencana strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut selama periode Januari-Desember 2015 dimana peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik merupakan tujuan strategis yang paling menonjol banyak diapresiasi oleh publik yang tercermin dari jumlah *user* selama tahun 2015 mencapai angka 1200 atau 80% dari target 1500 *user*. Sedangkan yang terendah adalah peningkatan birokrasi yang handal dimana hasil penilaian lembaga terkait menggambarkan lemahnya sisi kualitas sumber daya manusia di BPS Kabupaten Garut. Adanya permasalahan yang tersebut menunjukkan program-program tidak berjalan sebagaimana target yang ditetapkan dalam kebijakan strategis organisasi, hal ini mengindikasikan tata kelola organisasi dinilai belum efektif dan efisien, dilihat dari pencapaian target selama perodesasi tahun berjalan.

Begitu pula Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut telah menentukan indikator sasaran strategis pembangunan jangka menengah periode 2015-2019 terkait dengan aspek manajemen, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Sasaran Strategis

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pencapaian
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS	1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya BPS	1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1	85% 35%	80% 33%
		2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	75	60
		3. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS			

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2015

Berdasarkan Tabel 2, sasaran strategis program dukungan manajemen secara kumulatif belum mencapai hasil yang diharapkan, terutama tingkat pendidikan pegawai yang baru tercapai 33% sehingga penilaian SAKIP tergolong rendah dalam sisi pengembangan sumber daya manusia. Fenomena ini tentunya sangat kontra produktif dengan tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik, sebab secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi dan menyebabkan kurang efektifnya kinerja pegawai.

Terdapat dugaan bahwa fakta-fakta pada fenomena masalah tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus diteliti lebih jauh. Sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Statistik terhadap Manajemen Survei dalam Mewujudkan Efektivitas Kinerja Pegawai Lapangan Badan Pusat Statistik”**, adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Garut.

2 Metodologi

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskripsi dengan teknik survei. Metode deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena (Iskandar, 2014). Metode ini dapat memperluas ruang lingkup penelitian, masalah yang diselidiki dinyatakan dengan sangat tajam dan ekonomis, serta dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang spesifik.

Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Statistik (Winarno, 2012)	1. Komunikasi	a. Tranmisi kebijakan
		b. Konsistensi
		c. Kejelasan kebijakan
	2. Sumber Daya	a. Kemampuan sumberdaya manusia
		b. Dukungan aparatur pelaksana
		c. Dukungan anggaran
		d. Dukungan fasilitas
	3. Sikap Pelaksana	a. Disiplin aparatur
		b. Kejujuran aparatur
		c. Budaya kerja
		d. Pemahaman kebijakan
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP
		b. Fragmentasi
		c. Komitmen aparatur
Manajemen Survei (Hasibuan, 2014)	1. Perencanaan	a. Rencana kerja survei
		b. Rencana pengelola survei
		c. Rencana pelaporan survei
	2. Pengorganisasian	a. Struktur organisasi
		b. Uraian tugas

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas kinerja Pegawai (Iskandar, 2015)	3. Pelaksanaan	a. Pembagian tugas
		b. Peningkatan keterampilan
	4. Pengendalian	a. Prosedur tetap
		b. Tanggung jawab pelaksana
		c. Evaluasi
	1. Produktivitas	a. Input atau penggunaan sumber daya
		b. Proses atau pelaksanaan kegiatan
		c. Output atau kesesuaian pelaksanaan kerja dengan standar kerja dan penilaian kerja
	2. Mutu	a. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab
		b. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat segera
	3. Efesiensi	a. Ketepatan waktu pelaksanaan
		b. Ketepatan sasaran
		c. Kecepatan waktu dan pencapaian sasaran
		d. Penghematan waktu, biaya, tenaga pelaksana
	4. Fleksibilitas	a. Dapat melaksanakan tugas wewenang dan pendelegasian dari atasan
		b. Mampu bekerjasama dengan lembaga atau profesi lain untuk menyelesaikan pekerjaan
	5. Kepuasan	a. Perasaan terhadap pekerjaan
		b. Gaji yang diterima
		c. Peran dalam organisasi

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut dengan jumlah sebanyak 48 orang dengan perincian sebagaimana disjikan pada Tabel 4.

Table 4. Responden penelitian

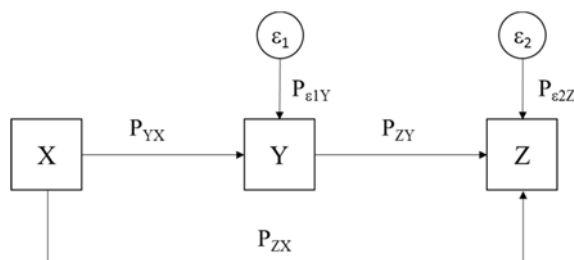
No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1 orang
2	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	6 orang
3	Staf dan KSK (Pelaksana)	41 orang
	Jumlah	48 orang

Untuk lebih mendapatkan data yang mewakili dan karena jumlah populasinya sedikit maka dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan teknik penarikan sampel, dimana peneliti langsung menetapkan seluruh populasi sebanyak 48 orang dijadikan responden penelitian atau responden, dalam hal ini objek yang dijadikan populasi adalah seluruh pegawai BPS di Kabupaten Garut. Selanjutnya, hasil penelitian diverifikasi dengan berbagai sumber pustaka, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ramdhani, & Ramdhani (2014), dan Ramdhani, et. al. (2014).

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang implementasi kebijakan statistik terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Secara skematis hubungan *causal effectual* antara variabel dalam paradigma penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan penghitungan statistika yang dapat diwakili dalam bentuk tabel sebagaimana tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penghitungan Analisa Statistika

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
X→Y→Z	0.6631	11.2966	4,4	0.4351	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
X → Y	0.3122	2,2296	2.0154	0,0975	Signifikan
X → Z	0.5326	4.4656	2.0154	0,2837	Signifikan
Y → Z	0.2569	2.0544	2.0154	0,1087	Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial implementasi kebijakan statistik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik

3.1 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Implementasi Kebijakan Statistik terhadap Manajemen Survei dalam Mewujudkan Efektivitas Kinerja Pegawai Lapangan Badan Pusat Statistik

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur X terhadap Y dan Z sebesar 0.6631. Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu F_{hitung}=11.2966 > F_{tabel}=4.4. Disimpulkan bahwa H₀ ditolak, artinya variabel implementasi kebijakan statistik

berpengaruh signifikan terhadap penerapan manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan statistik terhadap penerapan manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan dilihat dari *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar 0.4351.

Nilai-nilai di atas menunjukkan bahwa pengaruh total implementasi kebijakan statistik (X) terhadap manajemen survei (Y) dalam upaya mewujudkan efektivitas kinerja petugas lapangan di Kabupaten Garut (Z) sebesar 43,51% dan sisanya sebesar 56,49% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga dari perhitungan tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan statistik secara signifikan akan berdampak terhadap tata kelola organisasi, ketika tata kelola organisasi sudah baik serta memiliki kemampuan yang merata dalam mengembangkan potensi-potensi internal maka dengan sendirinya akan terbangun pula efektivitas kinerja petugas lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Salah satu butir penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dapat digunakan sebagai media untuk menciptakan konsensus, dimana semua pihak merasa diakui keberadaannya. Komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi yang menghasilkan konsensus, dimana setiap masalah selalu ditangani dengan pendekatan *win-win solution* (Ramdhani, & Suryadi, 2005)

Untuk meningkatkan performansi Badan Pusat Statistik dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pihak pengguna jasa. Badan Pusat Statistik perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam wujud e-governance. E-Governance membuat pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik dapat menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna (Pamoragung et. al., 2006; Ramdhani, et. al., 2006).

3.2.2 Pengaruh Implementasi Kebijakan Statistik terhadap Manajemen Survei

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar 0.3122. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel implementasi kebijakan statistik terhadap manajemen survei, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,2296 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.0154. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya implementasi kebijakan statistik berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

Besarnya pengaruh implementasi kebijakan statistik terhadap manajemen survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, ρ_{yx}^2 sebesar 9.75%, sedangkan sisanya 90.25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kebijakan yang tidak dimasukkan kedalam model.

Kebijakan statistik sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan arah tindakan kepada pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan dalam kompleksitas kegiatan yang menuntut adanya kerjasama banyak pihak dan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau menjadi penyebab ketidakefektivan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan sebagaimana pendapat Anderson (dalam Iskandar, 2014) adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (*a purposive course of action followed by an actor on set an actors in dealing with o problem or matter of concern*). Sementara menurut Winarno (2012) melihat implementasi kebijakan dalam pengertian yang lebih luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang

secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sedangkan Ramdhani, & Ramdhani (2017) memandang bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

3.2.3. Pengaruh Implementasi Kebijakan Statistik terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Lapangan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur pzx sebesar 0.5326. kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.4656 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.0154. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya implementasi kebijakan statistik berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

Besar pengaruh secara langsung implementasi kebijakan statistik terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan adalah sebesar 28.37%, sedangkan implementasi kebijakan statistik berpengaruh nyata dan positif terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan melalui manajemen survei adalah sebesar 4.27%. Sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel implementasi kebijakan statistik terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan sebesar 32.64% sedangkan sisanya sebesar 67.36% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel variabel kebijakan yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai yang tidak dilibatkan dalam model, diantaranya adalah budaya kerja. Menurut Ramdhani, et. al., (2017) budaya organisasi memberikan pengaruh terhadap komitmen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan studi lanjutan mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan. Dari pendapat tersebut kemudian definisi konseptual efektivitas kerja pegawai adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan para pegawai sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

3.3.4 Pengaruh Manajemen Survei dalam Mewujudkan Efektivitas Kinerja Pegawai Lapangan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur ρ_{zy} sebesar **0.2569**. kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.0544 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.0154. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya penerapan manajemen survei berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

Besarnya pengaruh manajemen survei berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut secara langsung adalah sebesar ρ_{zy}^2 sebesar 0,1087 atau sebesar 10.87% Sedangkan sisanya 89.13% yang tidak dimasukan ke dalam model.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut sebagai organisasi publik yang bertugas menyediakan informasi dan data statistik, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas seiring dengan semakin kuatnya desakan terhadap tata kelola pemerintah yang berorientasi terhadap pemenuhan publik di semua sektor kehidupan. Sementara itu kinerja pegawai lapangan sebagai salah satu tenaga fungsional merupakan unsur yang memberikan pengaruh cukup besar dalam menentukan kualitas dari pelayanan data dan informasi statistik. Efektivitas kinerja aparatur pemerintah ini dapat diukur dari bagaimana usaha organisasi mencapai tujuannya, sistem layanan yang diberikan oleh organisasi untuk menjalin hubungan dengan pengguna jasa (*user*) sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan bagaimana organisasi dan *users* saling mempengaruhi.

Salah satu rekomendasi penelitian ini adalah mengimplementasikan kegiatan manajemen survei melalui pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan perangkat yang memudahkan pekerjaan, yang menghasilkan/ mengolah informasi secara cepat, tepat, dan murah (Ramdhani, & Wulan, 2012; Slamet et. al., 2016).

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Implementasi kebijakan statistik berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, implementasi kebijakan statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen survei, implementasi kebijakan statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan dan manajemen survei berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

Kemudian disarankan kepada pihak terkait yakni *pertama*, kepada kepala BPS Kabupaten Garut hendaknya mengajukan kepada BPS Provinsi atau Pusat untuk mengalokasikan anggaran pembenahan organisasi secara menyeluruh, *kedua* kepada manajemen Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut agar menyusun agenda pembinaan internal pegawai di luar pembinaan dan pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik provinsi atau pusat. *ketiga*, kepada stakeholders perlu segera mengeluarkan regulasi internal untuk memberikan kejelasan

rumusan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai pendekatan yang paling memungkinkan dilakukan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar, J. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga
- Iskandar, J. (2015). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Puspaga
- Iskandar, J. (2015). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga
- Pamoragung, A., Suryadi, K., & Ramdhani, M. A. (2006). Enhancing the Implementation of e-Government in Indonesia through the High-Quality of Virtual Community and Knowledge Portal. 6th European Conference on e-Government (pp. 341-347). Marburg: Academic Conferences Limited.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization. *International Business Management*, 11(3), 826-803.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- Ramdhani, M. A., & Wulan, E. R. (2012). The Analysis of Determinant Factors in Software Design for Computer Assisted Instruction. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 1(8), 69-73.
- Ramdhani, M. A., Suryadi, K., & Susantosa, P. (2006). Telematic Policy Analysis in Developing Countries: A Case Study in Garut District-indonesia. *Journal of Applied Sciences Research*, 2(1), 58-66.
- Slamet, C., Rahman, A., Ramdhani, M. A., & Darmalaksana, W. (2016). Clustering the Verses of the Holy Qur'an using K-Means Algorithm. *Asian Journal of Information Technology*, 15(24), 5159-5162.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Study Kasus*. Yogyakarta: CAPS